

Resistensi dan Adaptasi terhadap Perubahan Sosioedukasi Keagamaan pada Masyarakat Hindu Kota Mataram

I Gusti Komang Kembarawan¹, I Made Ngurah Oka Mahardika², Putu Somiartha³

^{1,2,3} Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

E-mail : kembawaranngurah@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>Social Mobility; Social Stratification; Inter-Social Class Conflict</i>	<i>This study aims to analyze resistance and adaptation to changes in religious socio-education among the Hindu community in Mataram City in the context of modernization and social mobility. The approach used is a qualitative interpretative approach with a descriptive case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed through reduction, presentation, and drawing conclusions using triangulation of sources and methods. The results of the study indicate that changes in social structure marked by vertical mobility of society, especially the Jaba Wangsa group, encourage the transformation of the stratification system from descent-based to achievement-based. This process gives rise to resistance in the form of differing views regarding religious authority, leadership, and socio-religious representation. On the other hand, adaptation is seen through the strengthening of traditional social systems such as Sidhikara, Krama Pura, Banjar, and Pengamanan Swakarsa, which continue to function as integrative institutions. These systems also serve as ethnopedagogical media in transmitting moral, social, and religious values. Hindu values such as Tat Twam Asi, Tri Hita Karana, Vasudhaiva Kutumbakam, and Dharma are important foundations in maintaining social harmony, despite the gap between internalization and social practice. In conclusion, the dynamics of religious socio-education show the dialectic between resistance and adaptation that determines the sustainability of social cohesion of the Hindu community in Mataram City and provides implications for strengthening local wisdom-based education in the modern era in a sustainable manner in contemporary Hindu society.</i>

Kata kunci:	Abstrak
<i>Mobilitas Sosial; Stratifikasi Sosial; Konflik Antarkelas Sosial</i>	<i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resistensi dan adaptasi terhadap perubahan sosioedukasi keagamaan pada masyarakat Hindu Kota Mataram dalam konteks modernisasi dan mobilitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial yang ditandai oleh mobilitas vertikal masyarakat, khususnya kelompok Jaba Wangsa, mendorong transformasi sistem stratifikasi dari berbasis keturunan menjadi berbasis prestasi. Proses ini memunculkan resistensi dalam bentuk</i>

	perbedaan pandangan terkait otoritas keagamaan, kepemimpinan, dan representasi sosial-keagamaan. Di sisi lain, adaptasi terlihat melalui penguatan sistem sosial tradisional seperti Sidhikara, Krama Pura, Banjar, dan Pengamanan Swakarsa yang tetap berfungsi sebagai pranata integratif. Sistem tersebut juga berperan sebagai media etnopedagogi dalam mentransmisikan nilai moral, sosial, dan religius. Nilai-nilai Hindu seperti <i>Tat Twam Asi</i>, <i>Tri Hita Karana</i>, <i>Vasudhaiva Kutumbakam</i>, dan <i>Dharma</i> menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial, meskipun terdapat kesenjangan antara internalisasi dan praktik sosial. Kesimpulannya, dinamika sosioedukasi keagamaan menunjukkan dialektika antara resistensi dan adaptasi yang menentukan keberlanjutan kohesi sosial masyarakat Hindu di Kota Mataram serta memberikan implikasi bagi penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal di era modern secara berkelanjutan dalam masyarakat Hindu kontemporer.
--	---

I. PENDAHULUAN

Agama pada hakikatnya hadir sebagai pedoman hidup yang berfungsi menciptakan kedamaian, keteraturan, dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Melalui nilai-nilai ajarannya, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengarahkan pola hubungan sosial antarsesama manusia ((Djamaludin & Yasin, 2024). Dalam perspektif sosiologi agama, keberadaan agama memiliki peran penting sebagai instrumen integrasi sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan menjaga stabilitas masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai kekuatan integratif yang mempersatukan anggota masyarakat dalam suatu sistem nilai dan norma bersama (Ishomuddin, 2002). Oleh karena itu, kehidupan beragama yang ideal seharusnya mampu melahirkan hubungan yang harmonis baik dalam lingkup internal umat beragama maupun dalam relasi dengan kelompok sosial lainnya.

Realitas sosial menunjukkan bahwa agama tidak selalu menjadi faktor pemersatu. Dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat, perbedaan penafsiran ajaran, kepentingan sosial, ekonomi, maupun politik sering kali memunculkan konflik yang melibatkan kelompok-kelompok keagamaan (Ulya, 2016). Sanderson (2003) menjelaskan bahwa agama merupakan sistem keyakinan dan ritual yang berorientasi pada nilai-nilai kesucian, tetapi dalam praktiknya keberagamaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, berbagai perubahan sosial yang terjadi dapat memengaruhi pola hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam kehidupan beragama.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Modernisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan taraf ekonomi, dan memperluas akses terhadap berbagai sumber daya sosial (Jailani & Isma, 2024; Rosana, 2015). Di satu sisi, perubahan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, perubahan sosial juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial akibat munculnya pergeseran

status, perubahan pola relasi kekuasaan, serta munculnya kelompok-kelompok sosial baru yang memiliki kepentingan berbeda.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Hindu di wilayah ini didominasi oleh etnis Bali yang membawa serta sistem nilai, tradisi, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat Hindu Bali. Seiring dengan meningkatnya akses pendidikan dan perkembangan ekonomi, terjadi mobilitas sosial pada sebagian masyarakat Hindu yang sebelumnya berada pada kelompok sosial bawah (*Jaba Wangsa*). Kemajuan ekonomi yang dicapai kelompok ini telah mendorong peningkatan status sosial dan memperluas partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stratifikasi sosial yang sebelumnya bersifat relatif tertutup mulai mengalami perubahan menuju pola yang lebih terbuka.

Perubahan tersebut sesungguhnya memiliki akar historis yang panjang dalam masyarakat Hindu Bali. Triguna (1999) menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan dan pengaruh modernisasi telah melahirkan kelompok ekonomi baru yang sebagian besar berasal dari kalangan *Jaba Wangsa*. Kelompok ini mulai mempertanyakan struktur sosial tradisional yang dianggap membatasi mobilitas sosial dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, Putra Agung (1974) mengemukakan bahwa masuknya pendidikan Barat telah mendorong munculnya gagasan-gagasan pembaruan dari kalangan elit *Jaba Wangsa*, termasuk kritik terhadap sistem kasta dan berbagai praktik sosial yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

Secara historis, dinamika tersebut pernah memunculkan konflik antara kelompok *Tri Wangsa* dan *Jaba Wangsa* pada awal abad ke-20 di Bali. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan status sosial, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kekuasaan, dan peran dalam kehidupan masyarakat. Perdebatan yang berkembang melalui media *Bali Adnyana* dan *Surya Kanta* menunjukkan adanya kontestasi antara kelompok yang ingin mempertahankan struktur sosial tradisional dengan kelompok yang mendorong perubahan sosial yang lebih egaliter (Putra Agung, 1974). Meskipun konteks sosial masyarakat saat ini telah mengalami perubahan, jejak-jejak dinamika tersebut masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk interaksi sosial masyarakat Hindu.

Dalam perkembangan selanjutnya, konflik tidak lagi berpusat pada persoalan kasta secara formal, melainkan bergeser pada perebutan otoritas dalam bidang keagamaan dan kelembagaan sosial. Triguna (2001) menjelaskan bahwa munculnya perdebatan mengenai kependetaan dan representasi kelompok-kelompok sosial dalam pelaksanaan ritual keagamaan menunjukkan adanya transformasi bentuk konflik dari konflik status sosial menuju konflik otoritas keagamaan. Perubahan bentuk konflik ini menandakan bahwa modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan stratifikasi sosial, melainkan mengubah pola dan arena kontestasinya.

Kondisi serupa mulai terlihat dalam kehidupan masyarakat Hindu di Kota Mataram. Meningkatnya mobilitas sosial dan ekonomi telah melahirkan kelompok-kelompok sosial baru yang

memiliki aspirasi terhadap perubahan tata kehidupan keagamaan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat masih mempertahankan pola-pola tradisional yang dianggap sebagai warisan budaya dan identitas sosial. Perbedaan pandangan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang tercermin dalam penerimaan maupun penolakan terhadap berbagai gagasan pembaruan dalam praktik kehidupan beragama.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai dinamika stratifikasi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Hindu di Kota Mataram menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara mobilitas sosial, perubahan struktur kelas, dan keharmonisan kehidupan beragama. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam perspektif filsafat agama Hindu untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai universal Hindu, seperti Tat Twam Asi, Vasudhaiva Kutumbakam, dan Dharma, dapat menjadi landasan dalam membangun integrasi sosial di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan strategi studi kasus deskriptif untuk memahami dinamika konflik antarkelas sosial pada masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, serta realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan keagamaan masyarakat (Moleong, 1994). Lokasi penelitian berada di Kota Mataram, yang dipilih karena memiliki jumlah umat Hindu yang relatif besar, tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, serta menjadi wilayah yang menunjukkan dinamika stratifikasi sosial dan mobilitas sosial dalam masyarakat Hindu Bali. Sumber data meliputi informan, aktivitas sosial-keagamaan, lokasi penelitian, dan berbagai dokumen pendukung. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti beragama Hindu, memahami tradisi dan kehidupan sosial masyarakat, aktif dalam kegiatan keagamaan, serta bersedia memberikan informasi yang diperlukan. Pengembangan informan dilakukan menggunakan teknik snowball sampling hingga mencapai kejenuhan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Suprayogo & Tobroni, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mobilitas Sosial dan Perubahan Struktur Kelas pada Masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap berbagai sumber daya sosial telah mendorong terjadinya mobilitas sosial vertikal dalam masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram. Kelompok masyarakat yang secara tradisional berada pada lapisan Jaba Wangsa kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan tinggi, menempati posisi strategis dalam birokrasi, serta mengembangkan usaha ekonomi yang mampu meningkatkan status sosial mereka.

Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya transformasi dalam struktur sosial masyarakat. Status sosial yang sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh faktor keturunan mulai bergeser ke arah pencapaian (achievement) yang didasarkan pada tingkat pendidikan, profesi, dan kemampuan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram mengalami proses modernisasi yang berdampak pada semakin terbukanya sistem stratifikasi sosial.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Triguna (1999) yang menyatakan bahwa modernisasi dan pendidikan telah melahirkan kelompok sosial baru yang memperoleh legitimasi sosial melalui prestasi dan kemampuan ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan. Dengan demikian, struktur sosial tradisional mengalami penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan masyarakat modern.

3.2 Konflik Antarkelas Sosial dalam Kehidupan Keagamaan

Meskipun mobilitas sosial memberikan peluang bagi terciptanya kesetaraan sosial, penelitian ini menemukan bahwa perubahan tersebut juga memunculkan ketegangan antarkelompok sosial. Konflik yang terjadi tidak lagi muncul secara terbuka dalam bentuk pertentangan antara Tri Wangsa dan Jaba Wangsa sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi lebih banyak muncul dalam bentuk perbedaan pandangan mengenai otoritas keagamaan, kepemimpinan organisasi sosial-keagamaan, dan pelaksanaan tradisi keagamaan.

Sebagian informan menyatakan bahwa meningkatnya posisi sosial dan ekonomi kelompok Jaba Wangsa telah mendorong munculnya tuntutan yang lebih besar terhadap keterlibatan dalam pengambilan keputusan keagamaan. Di sisi lain, sebagian kelompok yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional memandang bahwa beberapa aspek kehidupan

keagamaan harus tetap berlandaskan pada norma dan tata nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan dinamika sosial yang berpotensi melahirkan konflik laten. Konflik ini tidak selalu tampak dalam bentuk pertentangan langsung, tetapi tercermin melalui perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan, pembagian peran dalam upacara keagamaan, serta interpretasi terhadap nilai-nilai tradisi Hindu Bali. Temuan ini memperkuat pandangan Triguna (2001) bahwa konflik sosial dalam masyarakat Hindu modern mengalami transformasi dari konflik status sosial menuju konflik otoritas dan representasi sosial-keagamaan.

3.3 Peran Nilai-Nilai Hindu dalam Membangun Harmoni Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram pada umumnya tetap menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Nilai-nilai Hindu seperti *Tat Twam Asi*, *Tri Hita Karana*, dan *Vasudhaiva Kutumbakam* masih dipahami sebagai pedoman dalam membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan status sosial.

Konsep *Tat Twam Asi* yang mengajarkan bahwa diri seseorang merupakan bagian dari diri orang lain mendorong tumbuhnya sikap empati dan solidaritas sosial. Sementara itu, konsep *Tri Hita Karana* menekankan pentingnya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sebagai dasar terciptanya keharmonisan sosial.

Walaupun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai bentuk eksklusivisme sosial yang masih berkembang dalam masyarakat. Beberapa praktik sosial masih menunjukkan adanya kecenderungan mempertahankan identitas kelompok tertentu yang dapat memengaruhi pola interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal Hindu dalam kehidupan sosial masyarakat.

4 Perspektif Filsafat Agama Hindu terhadap Dinamika Stratifikasi Sosial

Dalam perspektif filsafat agama Hindu, perbedaan status sosial tidak seharusnya menjadi dasar untuk menciptakan diskriminasi maupun dominasi sosial. Kitab suci Hindu menegaskan bahwa setiap manusia memiliki *Atman* yang sama sebagai percikan Brahman.

Oleh sebab itu, nilai kemanusiaan dan kesetaraan spiritual menjadi prinsip utama dalam kehidupan beragama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konflik yang muncul bukan disebabkan oleh ajaran agama Hindu itu sendiri, melainkan oleh interpretasi sosial terhadap struktur stratifikasi yang berkembang dalam masyarakat. Ketika identitas sosial dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka potensi konflik akan semakin besar. Sebaliknya, ketika nilai-nilai *Dharma*, *Tat Twam Asi*, dan *Vasudhaiva Kutumbakam* dijadikan landasan dalam kehidupan sosial, maka mobilitas sosial dapat diterima sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang wajar.

Dengan demikian, filsafat agama Hindu menawarkan kerangka etis yang mampu menjadi solusi dalam mereduksi konflik antarkelas sosial. Keharmonisan sosial dapat diwujudkan melalui penguatan kesadaran spiritual bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, meskipun memiliki latar belakang sosial yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram telah mendorong perubahan struktur kelas sosial dari pola yang relatif tertutup menuju pola yang lebih terbuka. Perubahan tersebut membawa dampak positif berupa meningkatnya kesempatan sosial dan ekonomi masyarakat, namun pada saat yang sama juga melahirkan dinamika baru berupa kontestasi sosial dalam bidang keagamaan dan kelembagaan sosial.

Konflik yang muncul bukan lagi konflik terbuka mengenai kasta atau keturunan, melainkan konflik yang berkaitan dengan otoritas, representasi, dan legitimasi sosial dalam kehidupan keagamaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai filsafat agama Hindu memiliki peran penting sebagai instrumen integrasi sosial untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, egaliter, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap ajaran *Tat Twam Asi*, *Tri Hita Karana*, *Vasudhaiva Kutumbakam*, dan *Dharma* menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram.

5 Sosioedukasi Keagamaan dalam Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Hindu Kota Mataram

Perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat Hindu Bali di Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari proses sosioedukasi keagamaan yang berlangsung secara formal maupun nonformal. Dalam konteks ini, sosioedukasi keagamaan merujuk pada proses

internalisasi nilai-nilai Hindu melalui lembaga pendidikan agama, organisasi sosial-keagamaan, keluarga, serta ruang ritual yang sekaligus menjadi arena reproduksi pengetahuan sosial. Mobilitas sosial vertikal yang terjadi pada kelompok *Jaba Wangsa* menunjukkan bahwa akses pendidikan, baik umum maupun keagamaan, menjadi faktor kunci dalam pergeseran status sosial berbasis prestasi. Temuan ini memperkuat bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai medium transformasi identitas sosial-keagamaan.

Dalam perspektif teori sosiologi pendidikan, kondisi tersebut dapat dibaca melalui pendekatan fungsional-struktural Durkheim, di mana pendidikan berperan sebagai institusi integratif yang mentransmisikan nilai kolektif masyarakat. Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi integratif tersebut dengan realitas diferensiasi sosial baru, khususnya dalam arena otoritas keagamaan. Artinya, sosioedukasi tidak berjalan netral, tetapi ikut menjadi ruang kontestasi simbolik antara kelompok yang memiliki legitimasi tradisional dan kelompok yang memperoleh legitimasi berbasis kompetensi modern.

Nilai-nilai filsafat Hindu seperti *Tri Hita Karana*, *Tat Twam Asi*, *Vasudhaiva Kutumbakam*, dan *Dharma* berfungsi sebagai kurikulum kultural yang tidak hanya diajarkan secara formal, tetapi juga dihidupkan melalui praktik sosial keagamaan. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara internalisasi nilai dan implementasi sosial, terutama ketika struktur sosial baru berbasis prestasi mulai menggeser otoritas tradisional dalam ruang-ruang keagamaan.

Sosioedukasi keagamaan pada masyarakat Hindu Kota Mataram dapat dipahami sebagai arena dialektika antara konservasi nilai dan adaptasi sosial. Di satu sisi, ia mempertahankan kontinuitas ajaran Hindu sebagai instrumen integrasi sosial, namun di sisi lain juga berhadapan dengan realitas modernisasi yang mendorong redistribusi otoritas sosial-keagamaan. Dalam konteks ini, penguatan literasi nilai Hindu yang bersifat inklusif menjadi penting untuk mencegah fragmentasi sosial baru yang berbasis legitimasi keagamaan, bukan lagi sekadar stratifikasi keturunan sebagaimana dalam fase historis sebelumnya.

SIMPULAN

Perubahan sosioedukasi keagamaan pada masyarakat Hindu Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari dinamika mobilitas sosial, modernisasi pendidikan, serta transformasi struktur stratifikasi sosial yang berlangsung secara gradual. Proses tersebut telah mendorong pergeseran sistem sosial yang semula berbasis keturunan menuju sistem yang lebih terbuka berbasis

prestasi, yang pada gilirannya memengaruhi pola relasi dan otoritas dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sosioedukasi keagamaan berperan sebagai ruang strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Hindu melalui institusi formal maupun nonformal seperti keluarga, banjar, krama pura, dan lembaga pendidikan agama. Namun demikian, sosioedukasi ini juga mengalami dualitas fungsi, yaitu sebagai instrumen integrasi sosial sekaligus arena kontestasi simbolik antara otoritas tradisional dan otoritas berbasis kompetensi modern. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan sosial tersebut tidak selalu diikuti oleh harmonisasi penuh dalam praktik kehidupan beragama. Meskipun nilai-nilai Hindu seperti *Tat Twam Asi*, *Tri Hita Karana*, *Vasudhaiva Kutumbakam*, dan *Dharma* tetap menjadi fondasi normatif dalam menjaga kohesi sosial, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa eksklusivisme sosial dan fragmentasi otoritas dalam ruang keagamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara internalisasi nilai dan praktik sosial yang aktual.

Sistem sosial tradisional masyarakat Hindu etnis Bali di Lombok seperti *Sidhikara*, *Krama Pura*, *Banjar*, dan *Pengamanan Swakarsa* terbukti tetap memiliki peran penting sebagai pranata sosial yang adaptif. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi menjaga solidaritas dan integrasi sosial, tetapi juga menjadi media etnopedagogi yang mentransmisikan nilai moral, spiritual, dan budaya secara berkelanjutan di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberlanjutan harmoni sosial masyarakat Hindu di Kota Mataram sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan sosioedukasi keagamaan modern dengan sistem pendidikan berbasis kearifan lokal. Penguatan literasi nilai Hindu yang inklusif serta revitalisasi sistem sosial tradisional menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat identitas budaya, dan mencegah fragmentasi sosial dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, F. H. S., Hardiyanti, A., Sudarwati, L., Sudiar, S., Daulay, P., Dewi, O., & Halimah, L. R. (2026). *Sosiologi Pembangunan: Teori, Konsep, Transformasi dan Realitas Sosial Pembangunan Nasional*. Star Digital Publishing.
- Djamaluddin, B., & Yasin, M. (2024). Kesenambungan dan Kesamaan Agama. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 227-244.
- Ishomuddin. (2002). *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Jailani, M. S., & Isma, A. (2024). Perubahan Sosial dan Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 692-701.
- Rosana, E. (2015). Modernisasi dalam perspektif perubahan sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67-82.
- Kusnanto, K., Noviyanti, N., Gudiato, C., & Usman, U. (2024). Transformasi sosial-ekonomi di masyarakat pedalaman: Integrasi teknologi dan ketahanan pendidikan menengah kebawah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 192-202.
- Moleong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra Agung, A.A.G. (1974). *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Rizik, M., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pendidikan masyarakat modern dan tradisional dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. *Jurnal Literasiologi*, 5(2).
- Sanderson, S.K. (2003). *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulistiani, A., Nurlaelawati, N., & Jalaludin, J. (2026). Peran Pendidikan Dalam Kebudayaan Dan Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 4(1), 145-152.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Triguna, I.B.G.Y. (1999). *Mobilitas Kelas, Konflik dan Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Hindu Bali*. Denpasar: Widya Dharma.
- Triguna, I.B.G.Y. (2001). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam multikultural sebagai resolusi konflik agama di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20-35.
- Zamani, F. E. (2022). Peran pendidikan teknologi dalam proses transformasi sosial. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 84-94.